

BAHASA DAN PERKEMBANGAN BUDAYA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Bahasa sebagai kajian akademik biasa dilihat sebagai ranah otonom dengan teori untuk sistem dan realitas kebahasaan. Termasuk juga pandangan tentang bahasa sebagai ranah simbolik dalam masyarakat, sebagai salah satu dimensi dari masyarakat simbolik/kultural. Untuk itu bahasa dan materi/substansi yang dikandungnya merupakan suatu entitas yang memiliki pertautan bersifat intrinsik secara epistemologis. Tetapi bagi orang yang belajar Studi Sosial (*Social Studies*) maupun Studi Budaya (*Cultural Studies*), ada yang menganut pandangan tentang bahasa sebagai ranah bersifat ekstrinsik, sebagai faktor yang menentukan dunia alam pikiran (*linguistic determinism*). Dalam kerangka ini seseorang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan mempersepsi dan berpikir tentang dunia dengan cara yang berbeda pula. Dalam kajian ini pula penekanan tentang bahasa dilihat dari fungsinya dalam masyarakat.

Sedang pengkaji Sosial/Kultural lainnya, khususnya yang mempelajari fenomena komunikasi/media memandang bahwa bahasa adalah kegiatan komunikasi yang berfungsi sebagai instrumen dalam hubungan sosial. Sebagaimana kegiatan komunikasi, bahasa diwujudkan dalam format verbal dan non-verbal, atau format visual dan non-visual. Dalam kehidupan sehari-hari bahasa verbal dikenal sebagai bahasa suatu masyarakat. Masing-masing format ini membawa tuntutan teknis yang berkonteks pada sifat bawaan (*traits*) media yang digunakan. Seperti halnya media sosial dengan sifat bawaan yang bertumpu pada faktor fisik manusia, media massa dengan landasan faktor perangkat teknologi mekanis dan elektronik, atau pun media interaktif dengan tumpuan pada perangkat teknologi telekomunikasi dan komputer multimedia. Masing-masing media hadir dengan sifat bawaannya, sehingga bahasa dalam komunikasi akan disesuaikan dengan faktor fisik manusia dan teknologi sebagai perpanjangan (*extended*) fisik manusia. Pandangan ini lahir dari konsep determinasi teknologi (*technological determinism*).

Selain itu kedudukan bahasa dalam konteks komunikasi dapat dilihat dari pendefinisian atas fenomena sebagai paradigma komunikasi, pertama komunikasi sebagai penyampaian pesan (*transmission of message*) bersifat pragmatis dalam interaksi sosial, dan kedua komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna (*production and exchange of meaning*) dalam konteks kultural. Disini fungsi bahasa pada satu sisi berkonteks pada paradigma komunikasi, apakah untuk pragmatis sosial dalam dimensi politik, ekonomi dan pergaulan sosial (*social life*), ataukah berkaitan dengan makna kultural. Ditarik ke permasalahan bahasa, maka berbahasa dalam kegiatan komunikasi itu dapat dilihat sebagai praktik sosial ataupun praktik kultural.

Pada sisi lain, bahasa dan komunikasi perlu dilihat secara kontekstual dari realitas masyarakat yang menjadi ruangnya. Secara konvensional masyarakat dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu dalam kehidupan sosial/empiris dan kehidupan kultural/symbolik. Karenanya dikenal masyarakat empiris (nyata, *real*) yang terwujud dari interaksi sosial dalam dimensi politik, ekonomi dan pergaulan sosial. Sedangkan masyarakat kultural/symbolik dibedakan atas dua macam, bersifat statis yaitu komunitas

* Pokok pikiran disampaikan pada Sarasehan Kebahasaan dan Kesastraan "Meraih Kemajuan dengan tetap Memelihara dan Mengembangkan Budaya sendiri" Balai Bahasa Yogyakarta, Yogyakarta 25 Oktober 2003

warga yang memperoleh warisan (*heritage*) makna yang mempertalikan kehidupan warga dalam masyarakat *real*, dan bersifat dinamis yaitu komunitas warga yang memproduksi makna, baik revitalisasi makna lama maupun penciptaan makna baru untuk kehidupan yang lebih baik.

(2)

Secara paralel, kegiatan komunikasi berlangsung dalam kaitan dengan kenyataan/realitas, yang dapat dipilah antara realitas keras (*hard reality*) dan realitas lunak (*soft reality*). Realitas keras adalah kehidupan bersifat empiris dalam interaksi manusia, bersifat fisik dan materil. Sedangkan kenyataan lunak adalah kehidupan dalam alam pikiran, penghayatan simbol dan nilai-nilai. Manakala kedua macam realitas ini masuk ke media, dikenal sebagai realitas media. Dari sini dikenal informasi keras dan informasi lunak sebagai materi dalam realitas media.

Realitas keras merupakan dunia yang tidak terelakkan, dijalani manusia baik secara institusional maupun individual. Sementara manusia sering mengabaikan realitas lunak, sebab dunia semacam ini hanya relevan saat kehidupan ingin diberi lebih bermakna. Di dalam masing-masing dunia ini berlangsung kegiatan komunikasi berupa pemanfaatan informasi. Informasi dari realitas keras memiliki nilai pragmatis tinggi, bernilai guna yang langsung terpakai dalam kehidupan sosial yang bersifat empiris. Sementara informasi lunak berfungsi untuk memenuhi dorongan psikhis. Inilah menjadi dasar dari konsep tentang fungsi media dalam masyarakat.

Lebih jauh, hubungan media dan masyarakat biasa dilihat dalam landasan konseptual tentang realitas. Untuk itu realitas dipilah dalam 3 kategori yaitu realitas empiris, realitas psikhis, dan realitas media. Realitas empiris terjadi dalam interaksi sosial bersifat obyektif, sedang realitas psikhis yaitu ranah (*domain*) berkaitan dengan alam kognisi dan afeksi bersifat subyektif, dan kedua realitas inilah mewujudkan masyarakat (*society*). Dinamika masyarakat pada dasarnya merupakan proses obyektivikasi dan subyektivikasi yang terwujud sebagai ranah empiris dan psikhis warganya. Sedangkan realitas media pada hakikatnya adalah sebagai refleksi dari masyarakat dengan realitas empiris dan psikhis.

Sebagai refleksi realitas empiris, proses pengwujudan realitas media sebagai materi faktual, mengikuti kaidah epistemologi (akademik dan jurnalisme untuk kebenaran) yang berada dalam landasan kebebasan akademik dan kebebasan pers. Sedang sebagai refleksi realitas psikhis, realitas media sebagai materi fiksional, diwujudkan melalui kaidah estetika, berada dalam landasan kebebasan ekspresi. Lingkup dan batasan dari kedua kebebasan ini berada dalam landasan acuan nilai bersama (*shared values*) dalam suatu masyarakat. Krisis epistemologi dan estetika dalam suatu masyarakat dapat terjadi akibat ketidak-jelasan acuan nilai (anomali) atau hilangnya nilai (anomi) dalam masyarakat di satu pihak, dan kelemahan metodologi pelaku profesional di pihak lain. Krisis ini akan mempengaruhi realitas media baik dalam dimensi kebenaran maupun estetika. Dengan kata lain, “carut-marut” kegiatan akademik (di antaranya kekerasan dalam pengajaran, plagiarisme penelitian/karya akademik) serta keberadaan media massa yang dianggap “kebablasan” (dengan limpahan materi kekerasan dan pornografi serta sewenang-wenang meng”intruding” kehidupan *privacy*) pada dasarnya bersumber dari krisis epistemologis dan estetika ini.

(3)

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, realitas media melahirkan bentuk kehidupan baru, dikenal sebagai realitas virtual atau *cyber*. Secara karegoris kemudian dibedakan 3 macam masyarakat, yaitu masyarakat *real*, masyarakat simbolik, dan

masyarakat *cyber*. Dengan begitu manusia masa kini pada dasarnya berada dalam 3 macam fenomena masyarakat, *real*, simbolik dan *cyber*. Ini membawa implikasi dalam kajian media, sebab peta permasalahan keberadaan media adalah dari kompleksitas fenomena masyarakat bersifat *real* yang terbentuk atas interaksi manusia dalam proses obyektifikasi dan subyektifikasi, masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna simbolik, dan masyarakat *cyber* (*cyber society*) yang terbentuk oleh penggunaan media berbasis telekomunikasi dan informasi multimedia (tele-informatika).

Lebih jauh ada pandangan yang menempatkan media sebagai teks yang merepresentasikan makna, baik makna yang berasal dari realitas empiris maupun yang diciptakan oleh media. Dengan demikian realitas media dipandang sebagai bentukan makna yang berasal dari masyarakat, baik karena bersifat imperatif dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat *real*, maupun berasal dari orientasi kultural pelaku media. Dari sini media dilihat pada satu sisi sebagai instrumen dari kekuasaan (ekonomi dan/atau politik) dengan memproduksi secara monopoli nilai kebenaran untuk pengendalian (dominasi dan hegemoni) masyarakat, dan pada sisi lain dilihat sebagai institusi yang memiliki otonomi dan independensi dalam memproduksi makna kultural dalam masyarakat.

Moda komunikasi yang terdapat dalam setiap masyarakat dapat dilihat sebagai parameter kondisional dari masyarakat. Bertolak dari pandangan dengan determinasi teknologi, keberadaan media komunikasi massa dilihat sebagai fenomena yang dibentuk oleh perkembangan masyarakat. Pada tahap pertama invensi dan inovasi teknologi mengubah konfigurasi masyarakat, melahirkan ragam masyarakat dalam kategoris agraris, industrial sampai ke masyarakat informasi. Dalam perubahan tersebut teknologi komunikasi berkembang sebagai upaya manusia untuk mengisi pola-pola hubungan dalam setiap konfigurasi baru.

Perkembangan teknologi yang mempengaruhi kegiatan komunikasi, pertaliannya dapat dilihat pada dua tingkat, pertama secara struktural, yaitu faktor teknologi yang mengubah struktur masyarakat, untuk kemudian membawa implikasi dalam perubahan struktur moda komunikasi. Kedua, perubahan moda komunikasi secara kultural membawa implikasi pula pada perubahan cara-cara pemanfaatan informasi dalam masyarakat. Dengan begitu determinasi teknologi dalam konteks komunikasi dapat dilihat dalam urutan berpikir: dari perubahan struktur masyarakat, struktur moda komunikasi dalam masyarakat, dan cara pemanfaatan informasi.

Tahap berikutnya, struktur moda komunikasi akan memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan komunikasi. Secara mendasar, setiap orang dipaksa untuk melek media (*media literacy*) yang berbasis pada teknologi sebagai syarat untuk bisa menjadi konsumen informasi. Setiap moda komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain seperti perbedaan bentuk simbolik yang digunakan menyebabkan masing-masing media membawa *bias* intelektual dan emosional yang berbeda, atau perbedaan aksesibilitas dan kecepatan informasi akan mengakibatkan perbedaan *bias* politik, atau perbedaan posisi dalam menghadapi media komunikasi menyebabkan *bias* sosial yang berbeda pula.

(4)

Demikianlah, setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari 3 macam realitas masyarakat, maka kesertaan (*sharing*) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kesertaan seseorang dalam menjalani kehidupannya di ketiga dimensi realitas masyarakat. Kedudukan seseorang

ditandai sebagai produsen (sebagai sumberdaya produktivitas) atau konsumen (sumberdaya pengguna) dalam setiap kegiatan bernilai baik pragmatis maupun kultural.

Pengenalan atas kondisi realitas di Indonesia dapat dilakukan melalui moda komunikasi yang mendukung proses interaksi sosial di satu sisi, dan pemaknaan dunia simbolik di sisi lainnya, baik dalam dimensi realitas masyarakat *real*, simbolik dan *cyber*. Inilah yang menjadi konteks dari kekinian manusia Indonesia. Keberadaan manusia Indonesia pada hakikatnya menghadirkan diri sebagai warga dari masyarakat yang secara sadar atau tidak, mendefinisikan dirinya di satu pihak, dan mendefinisikan realitas masyarakat yang melingkupinya. Bertolak dari pendefinisian ini permasalahan diidentifikasi dan respon dilakukan.

Sebagai warga masyarakat *real* seseorang mendefinisikan diri sebagai konsumen dalam ekonomi pasar, dan sebagai pengguna atau klien pelayanan publik dalam politik negara. Sebagai warga masyarakat simbolik seseorang mendefinisikan diri sebagai orang Jawa, Dayak, Madura atau lainnya. Tetapi sebagai warga dari masyarakat *cyber*, manusia Indonesia dapat menjadi dirinya sebagaimana dalam masyarakat *real* dan simbolik, atau sepenuhnya sebagai warga masyarakat virtual yang didefinisikan secara teknologis. Sebagai manusia semacam ini, parameter kedirian adalah kemampuan sebagai *user* atau *client*, baik sebagai produsen maupun konsumen. Se jauh mana realitas masyarakat memberi kepuasan atau sebaliknya menimbulkan kekecewaan baginya.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari realitas masyarakat dengan 3 dimensi, kesertaan (*sharing*) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kesertaan seseorang dalam menjalani kehidupannya di ketiga dimensi realitas. Kedudukan seseorang ditandai sebagai produsen (sebagai sumberdaya produktivitas) atau konsumen (sumberdaya pengguna) dalam setiap kegiatan bernilai baik pragmatis maupun kultural.

(5)

Di masa kini pengkaji ilmu sosial (termasuk kultural) pada dasarnya menghadapi realitas masyarakat dalam 3 macam dimensi fenomenal yaitu masyarakat dengan kehidupan nyata (*real*), masyarakat simbolik, dan masyarakat virtual/*cyber*. Pertanyaan yang menggugat adalah pertalian di antara masyarakat *real*, simbolik dan *cyber* yang menjadi ruang bagi seseorang. Setiap jenis masyarakat ini sebagai ruang hidup menentukan kehidupan seseorang, sebaliknya seseorang memiliki peran dalam mempengaruhi ruang tersebut. Kedudukan seseorang dalam masyarakat dapat dibedakan dalam masing-masing jenis masyarakat, serta fungsi yang dijalankannya, apakah dalam fungsi produktif atau konsumtif dalam pengertian normal, atau sebaliknya bersifat deviasi dalam masyarakat yang menjadi ruang hidupnya.

Interkontekstual ketiga macam realitas inilah sebagai konteks dari media. Realitas media pada dasarnya bersumber dari realitas empiris dan realitas psikhis yang mewujudkan sebagai masyarakat *real*. Sedang realitas media berbasis telekomunikasi dan komputer multimedia melahirkan masyarakat *cyber*. Kedua ragam masyarakat ini dapat dilihat keberadaannya dari makna simbolik melalui realitas media untuk mengenali fenomena sebagai masyarakat simbolik.

Pertalian realitas, masyarakat dan media secara konseptual dapat dirangkum sebagai berikut:

	MASYARAKAT <i>REAL</i>	MASYARAKAT SIMBOLIK	
REALITAS EMPIRIS	PRAGMATIS SOSIAL	MAKNA KULTURAL	
REALITAS PSIKHIS			
	REALITAS MEDIA		
	MEDIA SOSIAL	MEDIA MASSA	MEDIA INTERAKTIF
			MASY. CYBER
	RUANG PUBLIK		RUANG PRIVAT

Bahasa yang diwujudkan dalam realitas media, baik melalui media sosial, media massa maupun media interaktif pada dasarnya memiliki konteks pada masyarakat untuk tujuan pragmatis sosial atau pun makna kultural. Tujuan pragmatis sosial dan makna kultural ini berada dalam dimensi politik, ekonomi dan pergaulan sosial yang ditempatkan secara kategoris antara ruang privat (*private sphere*) dan ruang publik yang direfleksikan pada realitas media.

Bahasa yang digunakan dalam realitas media merefleksikan masyarakat dengan dorongan dan tujuan pragmatis sosial dan upaya produksi dan pertukaran makna kultural. Dari sini bahasa memiliki konteks pada masyarakat dalam dimensi politik, ekonomi dan sosial yang melahirkan bahasa politik, bahasa ekonomi dan bahasa pergaulan sosial. Sedang bahasa dalam realitas media seperti bahasa jurnalistik, bahasa sinematografi, dan bahasa internet, selain ditentukan oleh faktor dari dimensi masyarakat, juga memperhitungkan sifat bawaan dari media yang akan diwujudkan.

Dengan demikian bahasa pada realitas media pada dasarnya merupakan hasil dari dua faktor, yaitu dimensi masyarakat yang menjadi ruangnya, dan format materi informasi berdasarkan sifat media. Kedudukan bahasa seperti disebutkan diatas adalah dalam konteks masyarakat *real* dan *cyber*. Pada sisi lain bahasa sebagai pengwujud realitas media dipandang sebagai pesan bersifat pragmatis sosial, dan sebagai makna bersifat kultural. Dalam praksisnya, tentu sulit membedakan bahasa dalam fungsi sebagai pragmatis sosial dengan fungsi sebagai makna kultural, sebab kedua dimensi ini tiba pada penggunaannya sekaligus.

Dalam kajian Sosial/Kultural, secara umum disebutkan fungsi bahasa adalah untuk memasuki dunia pihak lain (*phatic function*), untuk dasar pengaturan hubungan (*regulatory function*), untuk pelepasan perasaan (*emotive function*), untuk tujuan estetis (*aesthetic function*), dan untuk menampung makna dibalik yang diekspresikan (*metalinguistic function*). *Phatic function* berupa percakapan basa-basi, untuk memelihara hubungan atau menciptakan hubungan dengan orang belum dikenal. *Regulatory function* dalam bahasa digunakan dalam hubungan sosial dengan tujuan yang sudah ditentukan bersama, seperti dalam kegiatan profesional atau manajemen. *Emotive function* merupakan bahasa untuk mengekspresikan perasaan, seperti anak-anak yang menciptakan sendiri bunyi. Di kalangan kaum muda kota di Jawa pada masa Orde Baru, seperti bahasa plesetan. *Aesthetic function* merupakan bahasa yang mirip dengan fungsi emotif, yang diekspresikan dengan kaidah tertentu untuk mendapat efek keindahan. Dan terakhir *metalinguistic function* yaitu memberikan pemaknaan atas kenyataan yang mendasari suatu bahasa diekspresikan.

Dengan konteks fungsi-fungsi bahasa di atas hubungan sosial dipelihara atau diciptakan. Keenam fungsi dapat berdiri sendiri, tetapi dapat pula bersifat interkontekstual. Seperti bahasa dalam *phatic function*, dapat menyusup di antara penggunaan bahasa dalam *regulatory function*. Misalnya percakapan antara operator tower penerbangan dengan

pilot yang dipandunya, selain berisi percakapan dalam kaidah profesional “anda sudah dapat menggunakan jalur X...” juga diselingi “kalau sudah mendarat, jangan lupa Y..” Y adalah nama cafe yang biasa dikunjungi orang-orang penerbangan. Atau dengan *emotive function*: “buset.... anda belum waktunya mendarat...”

Karenanya realitas suatu masyarakat dapat dinilai dari bahasa yang digunakan dalam setiap konteks perbahasaan. Secara ringkas konteks bahasa dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut.

BAHASA	MASYARAKAT		
	POLITIK	EKONOMI	SOSIAL
<i>Pathic function</i>	Tidak perlu	Tidak perlu	Perlu
<i>Regulatory function</i>	Perlu	Perlu	Perlu
<i>Emotive function</i>	Tidak perlu	Tidak perlu	Perlu
<i>Aesthetic function</i>	Tidak perlu	Tidak perlu	Perlu
<i>Metalinguistic function</i>	Tidak perlu	Tidak perlu	Perlu

Bahasa sebagai ranah budaya dilihat dari praktik sosial dalam tiga dimensi realitas masyarakat. Praktik sosial berbahasa ini dibedakan atas dasar ketepatan fungsi, karenanya dapat dibedakan antara yang bersifat fungsional ataukah dysfungsional. Bahasa “basa basi” dalam fungsi *pathic* misalnya hanya dapat digunakan dalam realitas pergaulan sosial. Dalam lingkup realitas politik dalam konteks hubungan profesional yang membawa konsekuensi dalam kehidupan publik, tentunya tidak tepat bahasa yang berfungsi untuk “phatic”.

Lewat pengamatan terhadap bahasa dalam konteks fungsinya, dapat diidentifikasi masyarakat yang “sakit”. Adapun “sakit”nya masyarakat politik misalnya dapat dikenali dari ekspresi yang dysfungsional. Lebih banyak tuntutan yang diekspresikan oleh satu pihak terhadap pihak lain dalam fungsi regulatoris, sementara penggunaan bahasa lebih bersifat metalinguistik, menyebabkan realitas politik tidak jelas bagi publik.

Selain itu penggunaan bahasa dapat pula mengikut dari fungsi media yang menjadi aparatus hegemonik dari kekuasaan yang dominan, atau terlibat dalam ajang perebutan dominasi dalam masyarakat politik. Fungsi bahasa kemudian tercampur baur di antara yang bersifat regulatoris dengan yang metalinguistik atau bahkan yang bersifat emotif. Penilaian terhadap bahasa yang terdapat di media, perlu dipilah dari asal muasalnya, apakah dibentuk dari sifat bawaan media, ataukah berasal dari pengguna bahasa yang berasal dari masyarakat.

Dengan demikian kondisi berbahasa dalam masyarakat Indonesia di satu sisi dapat ditempatkan dalam dimensi realitas yang menjadi konteksnya, dan pada sisi lain dari kondisi kultural dari masyarakat. Pengembangan budaya melalui bahasa pada dasarnya dilakukan melalui disiplin dalam penggunaan bahasa yang fungsional secara kontekstual.

(6)

Dalam kaitan dengan realitas di Indonesia adalah kondisi multi-kultural dalam ruang publik (*public sphere*)nya. Kondisi multi-kultural merupakan fokus penting di berbagai negara, sehingga pemerintahnya masing-masing memiliki kebijakan yang serius dalam strategi kultural. Untuk itu dikenal negara multi-bangsa (*multi-nation states*) atau negara banyak-suku (*poly-ethnic states*) mengingat varian komposisi warga masyarakatnya. Varian ini dapat atas dasar pengelompokan pendatang (imigran), agama, penduduk asli, dalam komposisi minoritas dan mayoritas. Pendekatan multi-kultural berfokus pada

perlindungan atas hak kultural komunitas minoritas, dengan menghindari dominasi kultural dari komunitas mayoritas.

Dalam skala makro diperlukan strategi yang diwujudkan sebagai kebijakan negara dengan pendekatan multi-kultural. Baru dari sini kemudian pendekatan multi-kultural menjadi dasar orientasi bagi institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan multi-kultural menjadi urusan bersama yang di dalamnya media massa ikut ambil bagian. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini sangat krusial karena tidak adanya strategi dasar dengan pendekatan multi-kultural dalam kebijakan negara.

Kondisi multi-kultural ini menyebabkan suatu komunitas negara menjadi rentan (*vulnerable*) dengan adanya potensi konflik. Konflik muncul dan mendominasi ruang publik manakala berlangsung anomali, yaitu tiadanya acuan nilai bersama dalam masyarakat multi-kultur. Ruang publik yang didominasi oleh sektarianisme agama mayoritas di Indonesia misalnya, merupakan anomali yang sulit dipahami. Lazimnya, sektarianisme lahir dari suatu komunitas agama, yaitu kelompok kecil yang menyempal dari induknya, sementara komunitas mayoritas akan berkecenderungan inklusif. Dengan kata lain, basis suatu sektarian adalah eksklusifisme komunitas lebih kecil yang berhadapan dengan komunitas lebih besar. Sering terjadi sektarian agama muncul di Indonesia dengan membangun jamaah sendiri melalui tempat ibadah yang terpisah dari komunitas lainnya dengan menganggap komunitas lainnya tidak syah peribadatannya. Secara sosiologis fenomena ini dipandang normal. Berbeda halnya jika suatu agama mayoritas menciptakan jurang sosial dengan komunitas agama lainnya, maka telah menjadi sektarian dalam basis negara multi-bangsa.

Sektarian lainnya bersifat sekuler, mewujudkan melalui eksklusifisme komunitas suku yang menyempal dari negara banyak-suku. Sektarian semacam ini dapat dipahami karena negara bangsa (*nation state*) Indonesia terbentuk melalui imajinasi kolektif atas dasar geo-politik dan kesadaran senasib dalam konteks kesejarahan yang diperoleh secara empiris. Kesadaran senasib ini mungkin tidak menjadi inspirasi lagi bagi generasi berikutnya karena tidak memiliki pengalaman empiris yang sama. Sementara internalisasi makna kesejarahan telah gagal akibat pola sosialisasi yang keliru, antara lain dengan mengagung-agungkan militerisme dalam penegakan dan pembangunan negara bangsa.

Dalam pada itu berbagai komunitas kultural suku mengalami marginalisasi dalam dominasi kultural komunitas suku yang lebih besar (dalam hal ini Jawa) yang diambil alih sebagai kultur negara. Sementara perekat bagi berbagai komunitas banyak-suku dalam negara, hanyalah birokrasi negara yang menjalankan militerisme, bukan kesadaran senasib dan kesejarahan. Dengan kata lain, negara mengadopsi kultur dari komunitas mayoritas, sementara kekuasaan dijalankan dengan kultur militer, sehingga suku-suku lain mengalami ketertindasan kultural.

(7)

Dari setiap masyarakat dikenal nomenklatur bahasa yang berfungsi secara pragmatis sosial (berdasarkan dan membentuk komunitas sosial), maupun yang memiliki makna kultural (dalam komunitas kultural), seperti Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, atau bahasa komunitas etnis. Ada bahasa yang fungsional bahkan penggunaannya melampaui komunitas pendukung aslinya, sebaliknya ada bahasa yang kehilangan penggunaannya sehingga akhirnya lenyap. Bahasa yang lenyap akan menjadi urusan peneliti untuk semacam rekonstruksi arkeologis.

Nomenklatur Bahasa Inggris yang sudah mapan berfungsi bagi komunitas antar bangsa untuk keperluan pragmatis sosial, sementara dalam makna kulturalnya berfungsi pada komunitas kultural yang sudah mapan pula. Fungsi pragmatis sosial suatu bahasa dalam suatu komunitas bangsa atau fungsi yang meluas antar bangsa tentunya didukung oleh banyak faktor, seperti kekuatan politik dan ekonomi. Tetapi fungsi dalam makna kultural dari suatu bahasa hanya dapat terwujud jika didukung oleh kemapanan komunitas kulturalnya.

Kompleksitas persoalan Bahasa Indonesia agaknya bersumber dari sifat nomenklatur yang belum mapan (*liquid*) di satu pihak, dan belum mapannya komunitas kultural pendukungnya pada pihak lain. Akibatnya, tercermin dalam penggunaan bahasa. Untuk keperluan pragmatis sosial, pengguna Bahasa Indonesia kebanyakan tidak berdisiplin, artinya mudah keluar dari kaidah sistemiknya, tanpa membawa konsekuensi dalam komunikasi. Dengan kata lain, dengan bahasa “pidgin” bahkan bahasa “tarzan” misalnya, komunikasi dapat berlangsung. Tetapi bahasa semacam ini akan mengikis gagasan dalam interaksi sosial, sekaligus merusak nomenklatur bahasa secara praktis.

Rendahnya disiplin pengguna Bahasa Indonesia dalam berbahasa untuk fungsi pragmatis sosial antara lain terlihat dari malas mencari kosa kata Indonesia karena lebih akrab dengan istilah asing, sehingga bahasa komunikasinya menjadi semacam bahasa “mestizo”. Begitu pula birokrasi yang militeristik selama Orde Baru, menyebabkan banyak digunakan bahasa yang bersifat sebagai kode kekuasaan, seperti akronim yang disusun menurut bunyi yang nyaman bagi militer, atau sakralisasi kekuasaan dengan istilah-istilah Jawa Kuno ataupun Sansekerta untuk istilah dan bangunan pemerintahan.

Upaya membangun nomenklatur bahasa Indonesia secara akademik dilakukan oleh para ahli bahasa Indonesia. Tetapi upaya ini tertinggal dari proses yang berlangsung dalam masyarakat, sebab nomenklatur hanya ada di kamus sedang secara praktis dia diacak-acak. Pada sisi lain, persoalan yang bersumber dari proses menjadi (*being*) komunitas kultural kebangsaan Indonesia agaknya ikut sebagai faktor dari silang-sengkarutnya penggunaan bahasa Indonesia dalam fungsi kultural. Fungsi ini hanya dapat berlangsung dalam dinamika produksi dan pertukaran makna kultural bertolak dari entitas komunitas kultural yang mapan.

Dengan demikian penggunaan bahasa Indonesia dalam fungsi kultural dilihat dari produksi makna dalam proses kreatif sastra melalui berbagai media komunikasi. Pada masa lalu kita mengenal sastra melalui media sosial, disampaikan secara lisan dalam lingkungan komunitas etnis tertentu. Tetapi untuk Bahasa Indonesia tidak pernah mewujud sebagai sastra lisan semacam itu. Kalau pun menggunakan media sosial adalah melalui teater (panggung). Sedangkan secara konvensional kita mengenal sastra melalui media massa cetak. Selain itu sastra juga mewujud melalui media berbasis teknologi lainnya seperti videografi. Makna kultural berasal dari sastra ini di satu sisi merupakan refleksi dari komunitas kultural, dan pada sisi lain sebagai bagian dalam proses membentuk komunitas kultural kebangsaan Indonesia.

Dari sini dibayangkan mendesak perlunya upaya bersama dalam membangun komunitas kultural kebangsaan Indonesia, melalui strategi kultural dengan fokus pada Bahasa Indonesia. Secara akademik yang dilakukan oleh para ahli Bahasa Indonesia dengan upaya tidak kenal lelah membangun nomenklatur Bahasa Indonesia, rasanya sudah sangat bermakna. Tetapi nomenklatur sebagai konsep hanya akan menjadi teks mati. Sedang teks sebagai praktik sosial terwujud dalam penggunaan Bahasa Indonesia dalam seluruh dimensi realitas masyarakat. Untuk itu perlu kegiatan akademik yang mendeteksi terus-menerus penggunaan bahasa Indonesia, dalam masyarakat. Seraya itu

perlu diikuti dengan strategi kebudayaan dengan fokus pada Bahasa Indonesia dalam praksis berbahasa Indonesia.

Keterampilan berbahasa Indonesia secara formal yang dikembangkan melalui sekolah perlu diperhatikan secara kritis, dengan pertanyaan kunci: sejauh mana anak didik mengapresiasi nomenklatur bahasa komunitas kebangsaannya sebagai suatu entitas. Dengan apresiasi semacam ini kedudukan pembelajar bahasa ditumbuhkan dengan kesadaran tentang bahasa sebagai refleksi komunitas kultural yang perlu dihayatinya, berikutnya penghayatan atas tanggungjawab sebagai pengguna, sekaligus pula daya kritis untuk mengenali proses kerusakan yang terjadi atas nomenklatur bahasa komunitas kebangsaannya tersebut. Dengan kata lain, pembelajaran Bahasa Indonesia bukan semata-mata pada tataran kognisi tentang sistem bahasa, melainkan pada tataran afeksi sebagai produsen dan pengguna makna kultural yang terdapat dalam bahasa yang dipelajarinya.

Lebih jauh Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media perlu mendapat perhatian bersama. Landasan untuk ini adalah kesadaran tentang fungsi bahasa sebagai refleksi sekaligus pembentuk komunitas kultural. Jika komunitas kebangsaan Indonesia menjadi keprihatinan bersama, maka di satu sisi kegiatan pengawasan media (*media watch*) berkaitan dengan Bahasa Indonesia perlu dikembangkan, sehingga kajian-kajian berkaitan dengan kontribusi media terhadap nomenklatur Bahasa Indonesia dapat menjadi acuan bagi pelaku profesi media. Pada sisi lain diperlukan upaya dari kalangan profesi media untuk menumbuhkan kesadaran bahwa Bahasa Indonesia yang digunakan, baik untuk fungsi pragmatis sosial maupun kultural, merupakan bagian dalam proses merusak atau membangun keindonesiaan.